

**ANALISIS KOALISI LUKMAN EDY DAN SURYADI KHUSAINI PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2013**

**HADI YULIANSYAH**

**dan**

**ISHAK**

[\(Hadi\\_yuliansyah@gmail.com\)](mailto:Hadi_yuliansyah@gmail.com)

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Panam Pekanbaru

**Abstract**

A political party is an organized group, whose members have orientation, values and ideals are the same. Political Recruitment is the process by which individuals enroll warrant or to occupy a position. Recruitment is a two way process , and its nature can be formal or informal. Recruitment candidates are strongly associated with the selection of leadership, both internal party leadership and the broader national leadership. The coalition formation occurs at the end of the second round, at which time the Indonesian Democratic Party of Struggle has not determined what his choice would form a coalition with the party. At the end of the second round official register at the County Election Commission on Wednesday, May 29, 2013 on Pekanbaru.

Lukman Edy is a young political leaders who have served at the level of the House of Representatives (DPR RI) 2 Riau electoral district , has held a strategic position in the CBA , the Secretary-General (Secretary General) and the position of Minister of Rural Development. His advancement to the Governor of Riau seats into its own political record for the Riau area on the General Election in 2013 has 5 pairs Candidates for Governor and Deputy Governor and a figure advanced young people as a candidate for governor. Suryadi Khusaini is Chairman of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), this figure had also run for vice-governor pairs with Chaidir in 2008.

***Keyword: Political Party, Political Recruitment, Coalition 2***

## **PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang Masalah**

Dalam demokrasi modern selalu mengandalkan sebuah sistem yang disebut keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Upaya menegakkan demokrasi tentulah dibutuhkan sarana atau saluran politik yang koheren dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal tersebut partai politik adalah salah satu sarana yang dimaksud, di mana partai politik mempunyai ragam fungsi, platform, dan dasar pemikiran. Hal itulah yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai demokrasi tidaknya suatu pemerintahan (Koirudin, 2004:1).

Rekrutmen calon berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pimpinannya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, partai politik mempunyai peranan yang sangat penting, karena partai merupakan medium salah satu bakal calon kepala daerah untuk dapat maju dalam pemilihan umum kepala daerah. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang akan melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih Gubernur pada tanggal 4 bulan September tahun 2013. Beberapa calon Gubernur Riau yang diusungkan oleh setiap partai, maka saya tertarik dengan salah satu partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau.

Dari beberapa Partai yang mengusung calon gubernurnya, hampir seluruh calon yang akan bertarung dalam pesta demokrasi di Provinsi Riau adalah ketua umum dari setiap partai-partainya, sementara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau bukan dari ketua Umum tersebut. Inilah yang menjadi daya tarik saya untuk mengambil masalah dalam sistem perekrutan calon yang direkrut oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau. Kemudian Mengapa harus Lukman Edy yang direkrut oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai bakal calon Gubernur Riau yang akan maju dalam pemilihan Gubernur Riau bulan september tahun 2013, Apalagi perolehan suara PKB tidak cukup untuk mengusung sendiri kadernya dan harus melakukan koalisi dengan partai lainnya. Lalu bargaining politik apa yang dilakukan oleh Lukman Edy terhadap PDI Perjuangan sehingga mau berkoalisi, padahal perolehan suara PDI Perjuangan jauh lebih besar dari PKB.

Terbentuknya koalisi ini terjadi pada detik detik akhir, dimana pada saat itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum menentukan pilihannya dengan partai apa akan berkoalisi. Pada saat detik detik akhir resmi mendaftarkan diri ke KPU Riau pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 di Jalan Gajah Mada Pekanbaru. 3

Lukman Edy merupakan tokoh politik muda yang telah berkiprah di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dari dapil Riau 2, pernah menjabat posisi strategis di PKB yaitu Sekretaris Jendral (Sekjend) dan posisi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Majunya beliau untuk memperebutkan kursi Gubernur Riau menjadi catatan politik tersendiri bagi daerah Riau yang pada Pemilu tahun 2013 memiliki 5 pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan ada sosok kaum muda yang maju sebagai Calon Gubernur. Suryadi Khusaini merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tokoh ini pernah juga mencalonkan jadi wakil gubernur berpasangan dengan Chaidir pada tahun 2008 namun pada masa tersebut beliau kalah dari calon incumbent saat itu Rusli Zainal.

## **b. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan proposal penelitian yaitu “Apa yang menjadi faktor Pendorong terbangunnya koalisi Lukman Edy dengan Suryadi Khusaini?”

## **c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor Pendorong terbangunnya Koalisi Lukman Edy dan Suryadi Khusaini.
2. Mendeskripsikan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur Riau Putaran Pertama.

### **b. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para peneliti yang ingin mengetahui faktor-faktor terbangunnya koalisi Lukman Edy dan Suryadi Khusaini pada Pemilihan Gubernur tahun 2013 dan sebagai tambahan literatur atau bahan kajian ilmiah dalam bidang ilmu politik yang berkaitan dengan partai politik dan pemilihan umum kepala daerah.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan pemikiran bagi PKB dan PDI Perjuangan untuk dapat merekrut dan menyeleksi calon gubernur yang akan datang sehingga mekanisme pencalonan kepala daerah lebih terbuka.

## **d. Kerangka Teoritis**

### **1. Rekrutmen Politik**

Rekrutmen Politik ialah proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Rekrutmen ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal. Merupakan proses dua arah, karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau didekati oleh orang lain dan kemudian bisa menjabat posisi tertentu.

Dengan cara yang sama, perekrutan itu bisa formal, kalau para individu direkrut dengan terbuka melalui cara institusional berupa seleksi atau pemilihan. Dan disebut dengan informal apabila para individunya direkrut 4

secara *prive* (sendirian) tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional tadi. Peristiwa sedemikian ini juga mencakup beberapa pertimbangan apakah mereka yang mengendalikan jabatan tadi bisa dengan tegas merupakan kelompok politik tertentu atau merupakan kelompok elit (Michael Rush & Philip Althoff, 2002: 23).

Ramlan Surbakti berpendapat bahwa rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsi nya manakala partai politik itu merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat yang berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik, sebab tanpa elit politik yang mampu melaksanakan peranannya, keberlangsungan hidup sistem politik terancam (Ramlan Surbakti, 1992: 118).

## **2. Sistem Rekrutmen Politik**

Menurut Alwis dalam Wazni (2010: 24) mengenai perihal pelaksanaan rekrutmen politik pada umumnya dikenal dua cara rekrutmen, pertama perekrutan terbuka bagi seluruh warga negara. Seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Setiap warga negara yang mempunyai bakat, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Kedua perekrutan tertutup yaitu, bahwa individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan.

Dalam perekrutan tertutup ini, perekrutan hanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan darah (keturunan atau keluarga) dengan penguasa atau individu tadi merupakan kawan-kawan akrab pihak penguasa atau mungkin individu-individu tadi berasal dari sekolah yang sama (satu almamater) dengan penguasa. Jadi dalam rekrutmen tertutup ini kesempatan untuk menduduki jabatan politik maupun pemerintahan terbatas sifatnya. Disamping itu para ahli juga membagi rekrutmen secara rasional dan irrasional (tradisional) yang pada hakikatnya sama pengertian dengan rekrutmen terbuka dan tertutup.

## **3. Rekrutmen Calon Kepala Daerah**

Dalam melaksanakan rekrutmen bakal calon, partai politik memberlakukan sistem atau mekanisme yang berbeda-beda, antara lain sistem pemilihan tertutup dan sistem konvensi (Joko J. Prihatmoko, 2005: 238-239).

### **1. Sistem pemilihan tertutup**

Sistem pemilihan tertutup adalah sistem rekrutmen bakal calon yang dilakukan hanya oleh pengurus partai politik dengan berbagai variasi sistem. Istilah ini “variasi sistem” merujuk pada mekanisme penentuan akhir bakal calon yang mengikuti kompetisi pilkada langsung atau yang akan menjadi calon. Partai-partai 5

politik yang demokratis, dengan sistem kepemimpinan demokratis pula, umumnya menetapkan bahwa penentu akhir pencalonan adalah pengurus partai politik setempat. Sedangkan partai-partai politik konservatif, dengan sistem kepemimpinan yang bergantung pada figure, pencalonan akhir ditentukan oleh pengurus pusat.

## 2. Sistem konvensi

Sistem rekrutmen calon yang sangat populer di negara-negara demokrasi adalah sistem konvensi. Sistem konvensi dilakukan dengan cara pemilihan pendahuluan terhadap bakal calon dari partai politik oleh pengurus dan atau anggota partai. Kelebihan sistem konvensi terletak pada pengembangan atau peningkatan popularitas bakal calon melalui prose kampanye internal partai dan pendidikan politik yang ditawarkan (debat public, penyampaian visi dan misi, dan lain-lain). Sistem konvensi sangat efektif bagi partai kader, dan sebaliknya kurang efektif bagi partai massa.

## 4. Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (Miriam Budiarjo, 2008: 403). Di negara yang demokratis menurut Miriam Budiarjo, partai politik juga memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

### 1. Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik berfungsi untuk menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

### 2. Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik, partai politik sebagai sarana bersosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku dalam masyarakat, dalam memenangkan calon dalam pemilihan, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, partai harus menciptakan image bahwa ia mementingkan kepentingan umum.

### 3. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Dari keempat fungsi partai politik, fungsi rekrutmen inilah yang paling menentukan dalam mendukung pasangan calon. Karena partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang untuk aktif dalam kegiatan politik.

### 4. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan suatu hal yang wajar, jadi fungsi partai politik disini ia harus dapat mengatasinya supaya tidak terjadi konflik (Miriam Budiarjo, 2008: 405). 6

Suatu partai politik juga harus mampu bersaing untuk dapat berkompetisi secara baik dan sehat apalagi dalam suatu pemilihan umum yang bebas dan demokratis, ditentukan oleh dua faktor. Pertama faktor yang bersifat internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam partai politik itu sendiri. Faktor internal dapat berupa konsolidasi partai, rekrutmen dan kaderisasi anggota partai politik. Kedua, faktor yang bersifat eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh partai politik itu. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah pelaksanaan pemilu dan persepsi masyarakat terhadap partai politik yang bersangkutan dan sistem politik yang berlangsung (Syamsudin Haris, 1991:133).

#### **e. Defenisi Konseptual**

1. Partai politik yaitu sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan kepentingan dalam bidang politik serta merupakan peserta pemilu.
2. PKB adalah merupakan singkatan dari Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu organisasi partai politik peserta pemilu dan merupakan partai yang cikal bakalnya dari NU (Nahdatul Ulama)
3. PDI Perjuangan adalah singkatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan organisasi partai politik peserta pemilu dan merupakan partai yang berhaluan Pancasila dan nasionalis.
4. Pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati atau walikota yang dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Bargaining politik adalah proses tawar-menawar (kepentingan politik).
6. Lobi politik adalah aktivitas komunikasi dan suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexi J. Meleong, 2000:30). Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

#### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru (DPW Partai Kebangkitan Bangsa, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau). 7

## 2. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat dalam proses pencalonan Bupati Kabupaten Siak. Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel *nonprobability* yaitu dengan cara *purposivesampling* hanya orang-orang yang ahli dan mengerti tentang fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2009: 91).

Dalam *purposif sampling*, pertimbangan peneliti memegang peranan, bahkan menentukan dalam pengambilan sekumpulan obyek untuk diteliti. Jelas bahwa nilai penelitian yang diperoleh berdasarkan sampel ini tergantung pada peneliti yang memberi pertimbangan (Syarifudin Hidayat, 2002:131-132).

No	Nama Informan	Jabatan
1	Abdul Wahid	Ketua DPW PKB Riau
2	Ricky Hariansyah	Wakil Ketua Dewan Syuro DPW PKB Riau
3	Afifuddin	Wakil Sekretaris DPW PKB Riau
4	Suyatno	Sekretaris Umum DPD PDIP Riau
5	T. Rusli Ahmad	Wakil Ketua DPD PDIP dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Riau
6	Mafirion	Ketua Tim Sukses Koalisi
7	Mustafa, S.Sos	Wakil Sekretaris PKB Provinsi Riau
8	Sofyan Hadi, S.Sos, M.Si	Akademisi UR
9	Baskoro, S.Ip, M.Ip	Akademisi UR